

Kajian Strategi Pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya dalam Perspektif Ruang Publik

Farah Diba Azulfa¹, Singgih Manggalou²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

farahdiba073@gmail.com¹, singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the development strategies of Surabaya City Square from a public space perspective. This study uses a descriptive qualitative method with a focus on the role of the Surabaya City Government, particularly the Surabaya City Culture, Youth, Sports, and Tourism Office. The analysis was conducted using Geoff Mulgan's (2009) public strategy theory, which covers five dimensions: purposes, environment, direction, action, and learning. The results show that the development strategy for Surabaya City Square has clear objectives, namely to provide an inclusive, multifunctional, and sustainable public space, as well as to integrate cultural heritage preservation with the strengthening of the city's identity. The strategic physical and social environment supports development, although there are still challenges such as limited parking space and suboptimal use of the food court. Strategic direction has been carried out through policies outlined in Local Regulation No. 3 of 2025 and technical implementation by the Technical Implementation Unit for Museum and Cultural Arts Building Management. Concrete actions in the form of cultural, educational, and creative economy programs have created an active and participatory public space. The evaluation and learning process continues through community feedback, which is used as a basis for continuous improvement. Thus, the development strategy for Surabaya City Square reflects a systematic effort to create a public space that is socially, culturally, economically, and environmentally relevant.

Keywords : Development strategy, Surabaya City Square, Public Space.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya dalam perspektif ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada peran Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori strategi publik Geoff Mulgan (2009), yang mencakup lima dimensi: *purposes, environment, direction, action, dan learning*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyediakan ruang publik yang inklusif, multifungsi, dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan pelestarian cagar budaya dengan penguatan identitas kota. Lingkungan fisik dan sosial yang strategis mendukung pengembangan, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan lahan parkir dan kurang optimalnya pemakaian *food court*. Pengarahan strategi telah dilakukan melalui kebijakan yang tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2025 dan implementasi teknis oleh UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya. Tindakan konkret berupa penyelenggaraan program budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif telah mewujudkan ruang publik yang aktif dan partisipatif. Proses evaluasi dan pembelajaran terus dilakukan melalui umpan balik masyarakat, yang digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya mencerminkan upaya sistematis dalam mewujudkan ruang publik yang relevan secara sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Kata kunci : Strategi Pengembangan, Alun-Alun Kota Surabaya, Ruang Publik.

PENDAHULUAN

Ruang publik merupakan elemen penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Eksistensinya memungkinkan terjadinya interaksi sosial, aktivitas budaya, rekreasi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. “*Public spaces are a vital ingredient of successful cities*” dikutip dari Andersson (2021), menyatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan suatu kota dapat diukur melalui kualitas ruang publiknya. Konsep ruang publik sebagai sebuah wilayah yang terbuka dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jerman, Jurgen Habermas, sebagaimana dijelaskan oleh Jurgen Habermas (2012), yang mendefinisikannya sebagai area terbuka yang di dalamnya masyarakat dapat berkumpul secara bebas. Dalam konteks ini, ruang publik (*public sphere*) diartikan sebagai kumpulan masyarakat yang berkumpul untuk membentuk sebuah tempat publik yang dikatakan dapat melakukan diskusi rasional, membangun opini, serta mengawasi tindakan pemerintah. Ruang publik berfungsi sebagai sarana interaksi sosial yang memperkuat hubungan antarindividu. Dalam konteks ini, ruang publik tidak hanya dipandang sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai medium komunikasi dan ekspresi sosial. Carr et al. (1992) menambahkan bahwa ruang publik yang ideal harus memiliki karakter responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bermakna secara sosial dan emosional, serta demokratis dalam aksesibilitasnya.

Ruang publik sudah sepantasnya tidak hanya memberikan keberadaannya pada kota, namun juga harus bisa memberikan ruang bagi masyarakatnya dengan ruang publik yang terbuka. Sifatnya haruslah dapat dinikmati semua orang tanpa adanya batasan. Sebuah ruang publik dianggap berhasil dan sukses dalam menjadikan ruang publik yang mendukung segala kegiatan masyarakat apabila memenuhi syarat tertentu. Carr et al. (1992) menguraikan bahwa ruang publik yang berkualitas selayaknya memiliki tiga persyaratan, yaitu *responsive*, *meaningful*, dan *democratic*. *Responsive* atau responsif dimaksudkan bahwa, sebagai area publik, tempat ini harus dapat beradaptasi untuk berbagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap tuntutan akan hal tersebut. *Meaningful* atau bermakna dimaksudkan bahwa sebagai sebuah ruang publik, masyarakat sebagai penggunaanya harus dapat merasakan kesan yang kuat antara ruang dengan kehidupannya. *Democratic* atau demokratis dimaksudkan bahwa ruang publik harus dapat dijangkau dan dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyediaan akan ketiga kriteria tersebut merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam konsep ruang publik untuk menunjang kegiatan atau aktivitas dan meningkatkan ketertarikan masyarakat.

Di Indonesia, pentingnya penyediaan dan pengelolaan ruang publik telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan bahwa “Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota harus mencapai setidaknya minimal 30% dari total luas kota. Sementara itu, 20% dari lahan wilayah terdiri dari ruang terbuka hijau publik.” Dengan adanya pernyataan akan pentingnya ruang publik di wilayah perkotaan, banyak daerah kemudian mengembangkan ataupun merevitalisasi infrastruktur ruang publik yang berpengaruh bagi kelangsungan aktivitas masyarakat di perkotaan. Salah satu kota yang cukup menonjol dalam hal ini adalah Surabaya. Berdasarkan data dari Surabaya.go.id (2022), ruang terbuka hijau di Surabaya telah

mencapai 22%, melampaui target minimum pemerintah pusat. Bahkan, pada tahun 2024, Surabaya tercatat sebagai kota dengan persentase ruang terbuka hijau tertinggi di Indonesia (GoodStats, 2025).

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, ditetapkan pengoptimalan fungsi ruang terbuka hijau publik sebagai bentuk strategi penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau di Surabaya. Disebutkan bahwasanya “Pengembangan ruang terbuka hijau publik paling sedikit seluas 20% dari luas wilayah daratan kota, meliputi makam, lapangan, taman, jalur hijau, hutan kota, kawasan pengangga (*buffer zone*), sempadan waduk/boezem, sempadan saluran dan sungai, dan sempadan pantai.”...Penyediaan ruang terbuka hijau ini dapat berupa taman kota, hutan kota, makam dan jalur hijau.” Taman kota menjadi area rekreasi dan tempat rehat bagi pengunjung kota dan penting dalam menjaga keanekaragaman kehidupan di dalam kota, kualitas udara dan suhu kota. Berdasarkan Permen PUPR No. 5 Tahun 2008, “Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.” Sebagai salah satu bentuk ruang terbuka yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan perkotaan, taman kota tidak hanya berperan sebagai area hijau, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial dan rekreasi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, alun-alun dianggap sebagai representasi khas dari taman kota, yang tidak hanya menyediakan ruang terbuka hijau tetapi juga menjadi pusat aktivitas publik yang mencerminkan karakter dan budaya suatu kota.

Alun-alun sebagai salah satu bentuk ruang publik di perkotaan perlu dikembangkan semaksimal mungkin untuk melengkapi kebutuhan masyarakat akan fungsinya sebagai ruang publik. Dalam konteks pembangunan kota menurut Subadyo et al. (2018), alun-alun menjadi representatif bagi penggambaran ruang publik yang inklusif, sebagai “paru-paru” kota dan “perekat sosial” yang responsive, demokratis, dan signifikan. Alun-alun dalam konsepnya dijadikan sebagai pusat kemasyarakatan (*civic centre*) yang merupakan bagian dari tata ruang kota, biasanya terletak pada pusat kota. Saat ini, alun-alun berperan sebagai tempat rekreasi dan relaksasi masyarakat karena lokasinya yang berada di pusat kota.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ruang publik, dengan persentase ruang terbuka hijau yang melebihi target nasional. Keberhasilan Surabaya dalam mengembangkan ruang publik tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam menata kota secara berkelanjutan dan inklusif. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pengembangan Alun-alun Kota Surabaya yang terletak di kawasan Balai Pemuda. Upaya revitalisasi kawasan Balai Pemuda yang tersambung ke Alun-Alun Surabaya melalui jalur *underground* bertujuan untuk mempromosikan Alun-alun Surabaya dengan konsep yang lebih kekinian dan memanfaatkan ruang publik dengan lebih baik. Kawasan ini tidak hanya mempertahankan nilai sejarah dan budaya, tetapi juga menghadirkan konsep ruang interaksi, rekreasi, dan pengembangan kreativitas bagi masyarakat. Sehingga kawasan ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik di area perkotaan.

Menurut Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005, “Revitalisasi ialah melakukan perubahan bangunan atau lingkungan cagar budaya supaya

dapat dilakukan pemanfaatan untuk fungsi yang lebih sesuai dengan tanpa melakukan perubahan yang drastis”. Menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menyebutkan bahwa “Revitalisasi merupakan sebuah langkah untuk menghidupkan kembali kondisi kawasan yang mengalami penurunan, mempertinggi nilai-nilai vitalis strategis serta signifikan dari kawasan yang masih memiliki potensi dan mengoperasikan kawasan yang mengarah berantakan atau kacau.” Revitalisasi merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali kawasan yang sebelumnya pernah berfungsi. Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan tersebut dan memulihkan warisan budaya.

Balai pemuda yang saat ini di *rebranding* dan dilakukan penggantian nama menjadi Alun-alun pada tahun 2021, sejak dahulu telah digunakan sebagai pusat aktivitas masyarakat. Kurangnya minat terhadap Balai Pemuda pada tahun 2017 menjadi dasar pengembangan yang dilakukan. Dikutip dari Suria (2021) melihat kondisi ini, Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya periode 2016 hingga 2020 mencari cara agar warga kota Surabaya dapat memanfaatkan ruang publik dengan mengubah Balai pemuda menjadi Alun-alun Kota Surabaya. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 2020, bersamaan dengan hari ulang tahun Indonesia yang ke-75, Alun-alun Surabaya secara resmi dibuka oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Kawasan ini berlokasi di Jalan Gubernur Suryo No. 15, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kawasan Balai Pemuda yang saat ini menjadi Alun-alun Surabaya merupakan kawasan cagar budaya. Hal ini menjelaskan bahwasanya kawasan alun-alun ini tidak dapat di renovasi serta dilindungi dan dijaga kelestariannya untuk menjaga nilai sejarahnya dan keasliannya.

Alun-alun Surabaya merupakan bentuk fasilitas yang ada di Balai Pemuda yang terdiri dari area *basement* dan area *outdoor*. Area *outdoor* buka setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB dan mampu menampung hingga 200 pengunjung. Untuk area *basement* buka setiap hari Selasa hingga Minggu mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB dan mampu menampung hingga 100 pengunjung. Alun-alun Surabaya dilengkapi dengan museum bawah tanah yang didalamnya terdapat berbagai macam ajang pameran dilengkapi dengan informasi asal-usul balai pemuda dan area *skatepark*.



Gambar 1 Basement Alun-Alun Kota Surabaya

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 16 Januari 2025

Alun-alun Kota Surabaya telah menjadi area yang menarik untuk dikunjungi bagi masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar Surabaya. Alun-alun Kota Surabaya telah menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat lokal, sekaligus merepresentasikan wajah baru bagi Kota Surabaya sebagai *icon* yang modern. Alun-Alun Kota Surabaya diarahkan sebagai pusat kemasyarakatan dengan interaksi sosial yang tak terbatas di era digital ini. Alun-alun ini dirancang dengan pendekatan modern, mengintegrasikan fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat, seperti ruang terbuka area pameran seni, dan zona multifungsi. Sebagai ruang publik yang dinamis, Alun-Alun Kota Surabaya kini menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara seperti pertunjukkan music, festival kuliner, dan pameran budaya. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperkaya fungsi sosial alun-alun tetapi juga menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan ruang publik yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban. Dengan tetap mempertahankan nilai sejarah dan budaya kawasan Balai Pemuda, alun-alun ini berhasil menggabungkan elemen tradisional dengan modernitas, menjadikannya sebagai ikon kebanggaan yang merefleksikan karakter kuat Kota Surabaya.

Meskipun Alun-Alun Kota Surabaya memiliki potensi besar sebagai ruang publik unggulan dan ikon kota, data kunjungan menunjukkan adanya tren penurunan pengunjung dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1 Jumlah Pengunjung Basement Alun-Alun Kota Surabaya 2022-2024

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, 2025

TAHUN 2022														
NO	JENIS PENGUNJUNG	BULAN											JUMLAH	
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP		DES
1	WISNU	21.516	-	11.637	12.674	66.388	75.745	119.521	50.969	43.820	50.180	59.403	125.776	637.629
2	WISMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		21.516	-	11.637	12.674	66.388	75.745	119.521	50.969	43.820	50.180	59.403	125.776	637.629
TAHUN 2023														
NO	JENIS PENGUNJUNG	BULAN											JUMLAH	
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP		DES
1	WISNU	62.282	51.089	54.423	43.151	60.210	51.259	55.228	37.889	44.360	48.766	52.502	64.273	625.432
2	WISMAN	-	-	-	11	32	12	6	77	81	34	61	10	324
JUMLAH		62.282	51.089	54.423	43.162	60.242	51.271	55.234	37.966	44.441	48.800	52.563	64.283	625.756
TAHUN 2024														
NO	JENIS PENGUNJUNG	BULAN											JUMLAH	
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP		DES
1	WISNU	52.929	47.314	31.854	43.455	46.912	46.390	46.292	42.645	40.829	64.411	42.926	40.126	546.083
2	WISMAN	67	51	62	58	38	39	86	183	102	14	42	28	770
JUMLAH		52.996	47.365	31.916	43.513	46.950	46.429	46.378	42.828	40.931	64.425	42.968	40.154	546.853

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, jumlah kunjungan pengunjung ke Alun-alun Surabaya mencapai 637.629 pengunjung pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 menurun dengan total 625.756 pengunjung, kembali menurun pada tahun 2024 dengan total 546.853 pengunjung. Penurunan ini terlihat dari data jumlah pengunjung *basement* Alun-alun Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir alun-alun tidak lagi menjadi salah satu destinasi favorit dibandingkan objek wisata lain yang ada di Surabaya. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara fungsi ideal yang diharapkan dengan pemanfaatan aktual yang terjadi di lapangan. Kurangnya kegiatan budaya dan seni yang konsisten, serta minimnya optimalisasi fasilitas publik menjadi beberapa faktor yang menghambat fungsi maksimal ruang ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi strategi pengembangan yang tepat agar kawasan ini dapat berfungsi optimal sebagai ruang publik.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kekosongan tersebut dengan mendalami strategi yang lebih inovatif dan terintegrasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi pengembangan Alun-alun Kota Surabaya dan juga mengetahui pemanfaatan Alun-alun Kota Surabaya sebagai ruang publik yang dapat digunakan dalam menciptakan Alun-alun Kota Surabaya sebagai ruang publik yang berkualitas dan sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan kawasan tersebut agar dapat menjadi ruang publik yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat urban saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya sebagai ruang publik oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Teknik analisis data mengacu pada model analisis kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode utama. Lokasi penelitian berada di Alun-Alun Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Gubernur Suryo No.15, Kecamatan Genteng, Surabaya. Fokus penelitian merujuk pada teori strategi publik dari Geoff Mulgan (2009), yang mencakup lima indikator yaitu, *purposes* (tujuan), *environment* (lingkungan), *direction* (pengarahan), *action* (tindakan), dan *learning* (pembelajaran). Kelima aspek ini digunakan sebagai kerangka dalam menganalisis kebijakan, program, dan implementasi yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya, termasuk bagaimana ruang publik ini diarahkan untuk mendukung inklusivitas, kenyamanan warga, serta penguatan identitas kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi selama kegiatan lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan perencanaan, buku, jurnal, artikel, serta dokumentasi foto atau arsip yang relevan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini meliputi Staff UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya, Petugas Keamanan Alun-Alun Kota Surabaya, serta masyarakat atau pengunjung di Alun-Alun Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan ruang publik dalam konteks perkotaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia ruang fisik, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan budaya yang merepresentasikan nilai-nilai lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Alun-Alun Kota Surabaya sebagai hasil revitalisasi kawasan Balai Pemuda merupakan salah satu bentuk strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam merespons kebutuhan akan ruang publik yang inklusif, adaptif, dan mampu menjembatani antara fungsi sosial, ekonomi, dan pelestarian warisan budaya. Keberadaan alun-alun ini tidak hanya menambah ruang interaksi warga, tetapi juga menjadi simbol transformasi kota yang mengedepankan integrasi antara modernitas dan nilai historis.

Sebagai ruang publik baru yang menempati kawasan cagar budaya, Alun-Alun Kota Surabaya menawarkan model pengelolaan ruang yang tidak hanya menekankan pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045, yang menekankan pentingnya pengembangan pariwisata dan penyediaan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan, Disbudporapar menggabungkan kedua unsur tersebut dengan pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya ini. Revitalisasi kawasan Balai Pemuda menjadi alun-alun ini tidak hanya menjadi area hijau,

tetapi juga menjadi sarana promosi nilai-nilai budaya dan kepariwisataan. Dalam pembahasan ini, peneliti menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya dalam mengembangkan Alun-Alun Kota Surabaya sebagai Ruang Publik. Penelitian ini menggunakan lima indikator untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan yaitu *purposes* (tujuan), *environment* (lingkungan), *direction* (pengarahan), *action* (tindakan), dan *learning* (pembelajaran). Melalui pengukuran terhadap indikator tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang baik dari strategi pemerintah dalam mengembangkan Alun-Alun Kota Surabaya Sebagai Ruang Publik.

1. *Purposes* (Tujuan)

Indikator *purposes* dalam strategi publik merujuk pada landasan normatif dan arah tujuan dari kebijakan atau tindakan strategis yang dijalankan oleh suatu organisasi atau institusi pemerintah. Dalam konteks pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya, tujuan utama dari kebijakan ini tidak hanya sebatas penyediaan ruang terbuka bagi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi tata ruang kota yang lebih besar dan berkelanjutan. Revitalisasi kawasan Balai Pemuda menjadi Alun-Alun diarahkan untuk menciptakan ruang publik multifungsi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai historis kawasan cagar budaya. Pengembangan ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang inklusif, aman, dan multifungsi dengan kondisi eksisting sebelumnya yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tersebut, khususnya di kawasan pusat kota yang padat.

Revitalisasi kawasan Balai Pemuda menjadi Alun-Alun Kota Surabaya dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan ruang publik yang tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga mengandung nilai simbolik dan historis. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menciptakan ruang interaksi sosial yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mempertahankan dan mengangkat kembali nilai-nilai budaya dan sejarah kota. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pembangunan kota berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pelestarian cagar budaya dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Lebih lanjut, tujuan dari pengembangan ini diwujudkan dalam tiga sasaran strategis utama: (1) menciptakan ruang publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, (2) menjawab kebutuhan sosial dan aspirasi beragam pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum, komunitas seni, hingga pelaku UMKM, dan (3) memperkuat identitas lokal melalui integrasi warisan budaya ke dalam desain dan fungsi ruang. Penggunaan desain inovatif seperti penataan ruang bawah tanah yang mempertahankan struktur bangunan cagar budaya menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika dan fungsional, tetapi juga keberlanjutan sejarah dan arsitektur kota.

Secara keseluruhan, indikator *purposes* mencerminkan upaya strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam mengintegrasikan visi pembangunan yang inklusif dan partisipatif, dengan menjadikan ruang publik sebagai platform bagi interaksi lintas kelompok, ekspresi

budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Strategi ini menjadi representasi dari pendekatan jangka panjang yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, konteks sosial-budaya lokal, serta tujuan pembangunan kota yang lebih holistik dan berkelanjutan.

2. *Environment* (Lingkungan)

Indikator *environment* dalam strategi publik mengacu pada kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan atau strategi. Dalam konteks pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya sebagai ruang publik, faktor lingkungan mencakup aspek fisik, sosial, budaya, kelembagaan, hingga dinamika politik dan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk konteks pengembangan. Evaluasi terhadap lingkungan ini menjadi krusial karena keberhasilan suatu strategi publik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain kebijakan dengan realitas di lapangan.

Kondisi lingkungan fisik dan sosial menjadi faktor penting dalam mendukung strategi pengembangan ruang publik. Secara fisik, Alun-Alun Kota Surabaya terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu di jantung kota, tepatnya di kawasan Balai Pemuda yang merupakan salah satu titik bersejarah dan pusat kegiatan kota. Lokasi ini memiliki konektivitas yang tinggi dengan berbagai moda transportasi publik, termasuk bus kota dan kedekatannya dengan Stasiun Gubeng. Tingkat aksesibilitas yang tinggi ini memperkuat peran alun-alun sebagai ruang publik yang inklusif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk wisatawan dari luar kota. Desain bawah tanah yang digunakan untuk mengembangkan ruang publik ini juga memberikan nilai tambah berupa pengurangan dampak kebisingan, pencemaran udara, dan optimalisasi pemanfaatan lahan tanpa mengganggu struktur cagar budaya di atasnya.

Namun demikian, kondisi lingkungan juga menyimpan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan lahan parkir kendaraan pribadi yang hanya tersedia di basement dalam jumlah terbatas. Keterbatasan ini cukup dirasakan saat terjadi lonjakan pengunjung, khususnya ketika event besar diselenggarakan. Meski demikian, tantangan ini juga menjadi peluang untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, yang secara jangka panjang mendukung prinsip pengembangan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dari sisi sosial, Alun-Alun berfungsi sebagai ruang interaksi lintas kelompok masyarakat, baik untuk kegiatan rekreasi, komunitas, maupun ekonomi informal. Keberadaan petugas kebersihan dan keamanan, serta keterlibatan Satpol PP, menunjukkan adanya kapasitas kelembagaan yang mendukung pengelolaan kawasan. Dari aspek sosial dan budaya, Alun-Alun Kota Surabaya telah berhasil membentuk ekosistem ruang yang dinamis. Kawasan ini menjadi tempat berkumpul masyarakat dari berbagai latar belakang, usia, dan kepentingan. Aktivitas yang berlangsung tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga edukatif dan ekonomi, mulai dari pertunjukan seni, ruang baca, pelatihan komunitas, hingga aktivitas UMKM. Interaksi antarwarga yang terbentuk di ruang ini mencerminkan keberhasilan dalam menghadirkan ruang publik yang mendorong kohesi sosial dan partisipasi warga. Namun, tantangan masih muncul, khususnya terkait perilaku pengunjung yang belum sepenuhnya memahami nilai dan fungsi ruang publik, seperti vandalisme atau penggunaan ruang secara tidak tertib. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan

kesadaran dan edukasi masyarakat tetap perlu diperkuat. Ancaman vandalisme dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian ruang publik menjadi tantangan non-fisik yang signifikan. Pengelola telah menerapkan strategi edukatif melalui sistem pengumuman dan sosialisasi kepada pengunjung.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan Alun-Alun dilakukan secara terpadu oleh Disbudporapar melalui UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya. Kolaborasi dengan Satpol PP Pariwisata, petugas keamanan internal, dan petugas kebersihan menunjukkan adanya sistem manajerial yang cukup tertata. Kehadiran petugas secara bergilir dan penerapan SOP dalam pelaksanaan kegiatan menjadi cerminan dari kesiapan kelembagaan dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan ruang. Di samping itu, adanya dukungan regulasi dari kebijakan tingkat kota memperkuat legitimasi strategi pengembangan ini dalam konteks tata kelola ruang publik Surabaya secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, indikator *environment* pada strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya menunjukkan kondisi lingkungan yang relatif mendukung baik dari segi lokasi, infrastruktur, hingga dinamika sosial-budaya yang terbentuk. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran publik terhadap pelestarian ruang, serta tekanan dari dinamika urbanisasi tetap menjadi catatan penting. Strategi pengembangan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan menjadi kunci untuk menjaga efektivitas dan keberlanjutan fungsi alun-alun sebagai ruang publik kota.

3. *Direction* (Pengarahan)

Indikator *direction* dalam strategi publik merujuk pada sejauh mana organisasi atau institusi yang bertanggung jawab telah menetapkan arah kebijakan yang jelas, logis, dan terstruktur untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini mencakup penetapan prioritas, penjabaran langkah-langkah implementatif, hingga koordinasi lintas sektor yang mampu menjembatani antara perencanaan dan pelaksanaan. Dalam konteks pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya sebagai ruang publik, aspek pengarahan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar terimplementasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), bersama UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya, telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam menyusun kerangka pengarahan yang mendukung pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya. Arah kebijakan pengembangan Alun-Alun Surabaya diformulasikan secara sistematis melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045. Kebijakan ini mengintegrasikan, pengembangan ruang publik diarahkan untuk mengintegrasikan pelestarian warisan budaya (*heritage*), penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), serta penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa arah kebijakan pengembangan alun-alun tidak bersifat parsial, tetapi merupakan bagian dari visi pembangunan kota jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengarahan tidak hanya tertuang dalam kebijakan makro, tetapi juga diimplementasikan melalui strategi operasional yang bersifat teknis dan adaptif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, arah kebijakan dikonkretkan melalui penjadwalan kegiatan, penataan penggunaan ruang, serta penetapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan berbagai aktivitas. Misalnya, setiap kegiatan yang akan diselenggarakan di Alun-Alun wajib melalui proses koordinasi formal dengan pengelola dan aparat keamanan, serta mengikuti panduan teknis terkait penggunaan fasilitas, pengaturan lalu lintas pengunjung, dan ketentuan kebersihan. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya ruang publik yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga tertib dan terorganisasi. Meski demikian, pengelolaan masih menghadapi tantangan, seperti kesenjangan antara visi pelestarian cagar budaya dengan aktivitas publik yang dinamis. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang publik perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari pengarahan strategis.

Pengarahan strategis ini juga mempertimbangkan dinamika sosial yang terus berkembang. Salah satu bentuk adaptasi terlihat dari fleksibilitas pengelola dalam merespons kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah, termasuk dalam hal jenis kegiatan, waktu penyelenggaraan, dan pola interaksi publik. Misalnya, disesuaikannya jam operasional kegiatan budaya dengan waktu-waktu ramai pengunjung, atau dilakukannya penyesuaian tema kegiatan berdasarkan momen tertentu seperti Hari Pahlawan atau bulan Ramadhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengarahan strategi pengelolaan tidak bersifat kaku, tetapi responsif terhadap konteks sosial dan kultural masyarakat kota.

Meski demikian, pelaksanaan arah kebijakan ini tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara aktivitas publik yang dinamis dengan kewajiban pelestarian bangunan cagar budaya Balai Pemuda sebagai lokasi utama alun-alun. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya dan pengelola perlu terus mengembangkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang mampu menjamin kelestarian struktur arsitektural tanpa menghambat pemanfaatan ruang oleh masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang publik juga menjadi tantangan tersendiri, yang perlu dijawab melalui strategi pengarahan yang tidak hanya teknis, tetapi juga edukatif dan partisipatif.

Dengan demikian, indikator *direction* dalam strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya menunjukkan bahwa telah terdapat arah kebijakan yang relatif jelas dan konsisten, baik secara struktural melalui regulasi, maupun secara operasional melalui praktik pengelolaan harian. Namun, untuk menjamin keberlanjutan arah tersebut, dibutuhkan sistem evaluasi dan pembaruan yang lebih sistematis agar kebijakan yang ada tetap relevan dengan dinamika masyarakat dan tantangan tata ruang kota di masa mendatang.

4. *Action* (Tindakan)

Indikator *action* dalam strategi publik menekankan pada pelaksanaan nyata dari arah kebijakan yang telah ditetapkan. Ini merupakan tahap di mana strategi diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret, baik dalam bentuk program, aktivitas, pelayanan, maupun intervensi teknis di lapangan. Dalam konteks pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya,

indikator ini mencerminkan bagaimana pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) dan UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya, menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk mengoperasionalkan visi pengembangan ruang publik yang inklusif, edukatif, dan berkelanjutan.

Implementasi strategi pengembangan tercermin dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin. Berbagai bentuk tindakan nyata telah dilakukan untuk menghidupkan Alun-Alun Kota Surabaya sebagai ruang publik aktif. Salah satu program utama adalah penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya secara rutin, seperti pertunjukan ludruk, reog, pameran seni rupa, festival kuliner, hingga pelatihan seni gamelan dan teater dalam program “Generasi Arek-Arek Suroboyo.” Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan pelestarian budaya lokal. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas menjadi ciri khas dari strategi tindakan ini, yang menunjukkan adanya ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang publik. Hal ini sejalan dengan semangat inklusivitas yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan alun-alun.

Pengelolaan operasional kawasan juga menunjukkan tindakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Penugasan petugas kebersihan dan keamanan secara shift, pengawasan terhadap kegiatan publik, serta pemeliharaan fasilitas secara rutin menunjukkan bahwa alun-alun tidak hanya dihidupkan melalui program acara, tetapi juga dijaga kualitasnya sebagai ruang fisik yang aman, nyaman, dan layak digunakan. Pengelola juga menerapkan sistem penyewaan ruang publik, seperti Balai Budaya, ruang hall, dan area Amplitheater, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan komunitas maupun komersial. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai strategi distribusi fungsi ruang agar tidak bergantung pada program pemerintah semata.

Namun, beberapa tindakan yang dilakukan masih menghadapi tantangan implementatif. Salah satu contohnya adalah kurang optimalnya pengelolaan area foodcourt yang berada di basement alun-alun. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hanya satu dari lima tenant yang beroperasi secara aktif. Aktivitas jual beli di area ini cenderung rendah dan hanya meningkat ketika ada event besar atau saat akhir pekan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi aktivasi ruang belum sepenuhnya berhasil dalam semua aspek. Faktor-faktor seperti kurangnya promosi, pemilihan lokasi tenant, serta pola perilaku pengunjung perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas tindakan ke depan. Selain itu, belum semua kegiatan komunitas terakomodasi secara optimal. Beberapa komunitas menyampaikan bahwa proses penyewaan ruang masih dirasa birokratis dan kurang fleksibel. Hal ini menjadi catatan penting bahwa strategi tindakan tidak hanya harus operasional, tetapi juga adaptif dan ramah terhadap kebutuhan kelompok-kelompok sosial yang menjadi pengguna utama ruang publik.

Secara keseluruhan, indikator *action* dalam strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya menunjukkan adanya pelaksanaan yang cukup komprehensif, baik dari sisi program kegiatan, manajemen operasional, maupun pemanfaatan ruang. Pemerintah kota telah berhasil menghidupkan alun-alun sebagai ruang publik yang aktif dan fungsional. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih maksimal, tindakan-tindakan tersebut perlu

diimbangi dengan sistem evaluasi kinerja, penguatan strategi promosi, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara lebih luas. Dengan pendekatan ini, tindakan yang dijalankan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjawab tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat kota.

5. *Learning* (Pembelajaran)

Indikator *learning* dalam strategi publik mengacu pada proses pembelajaran yang terjadi secara berkelanjutan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pembelajaran ini mencakup proses refleksi, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan berdasarkan pengalaman, masukan dari publik, serta hasil implementasi di lapangan. Dalam konteks pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya, aspek ini menjadi penting karena ruang publik bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, perubahan kebutuhan masyarakat, serta efektivitas pengelolaan. Proses pembelajaran tidak hanya bertujuan memperbaiki kekurangan, tetapi juga memastikan bahwa strategi pengembangan ruang publik tetap relevan dan adaptif dalam jangka panjang. Strategi pembelajaran dalam pengelolaan Alun-Alun Surabaya dilakukan melalui proses evaluasi berkala dan umpan balik dari masyarakat. Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas kegiatan, respons pengunjung, serta keberhasilan program yang telah dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola Alun-Alun Kota Surabaya telah menunjukkan upaya yang cukup aktif dalam menerapkan proses evaluasi dan umpan balik sebagai bagian dari strategi pengelolaan. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat pengguna ruang melalui berbagai kanal, seperti kotak saran, Google Review, serta interaksi langsung dengan pengunjung dan komunitas yang terlibat. Data dari Google Review menunjukkan bahwa Alun-Alun Kota Surabaya mendapatkan rating tinggi, yaitu 4,8 dari 5 bintang, yang menunjukkan tingginya apresiasi publik terhadap kualitas ruang, kenyamanan fasilitas, hingga fungsi edukatif dan rekreatif yang ditawarkan. Ini merupakan indikasi bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil telah menjawab sebagian besar harapan publik.

Namun demikian, pembelajaran juga muncul dari berbagai tantangan dan kekurangan yang diidentifikasi selama implementasi berlangsung. Salah satu contoh konkret adalah rendahnya minat masyarakat terhadap pertunjukan budaya tradisional seperti ludruk, yang sering kali sepi penonton. Berdasarkan wawancara, permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya minat, tetapi juga oleh penjadwalan yang kurang tepat serta promosi yang kurang maksimal. Pengelola menyadari pentingnya momentum dan segmentasi audiens dalam penyelenggaraan acara, sehingga ke depan diperlukan perencanaan yang lebih berbasis data, seperti memperhatikan tren waktu kunjungan, usia pengunjung dominan, dan minat tematik masyarakat urban terhadap pertunjukan budaya. Selain itu, aspek pembelajaran juga tampak dalam bagaimana pengelola merespons kritik terkait fungsi ruang yang kurang diawasi, seperti ruang pameran di basement yang beberapa kali digunakan secara tidak semestinya oleh pengunjung. Masalah ini menunjukkan bahwa keberhasilan ruang publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh perilaku pengguna dan sistem pengawasan yang diterapkan. Merespons hal ini, pengelola mulai meningkatkan edukasi melalui sistem pengumuman

audio (*announcer*), serta menempatkan petugas tambahan di area-area rawan untuk meningkatkan pengawasan. Tindakan-tindakan ini menjadi bagian dari strategi *learning by doing* yang mencerminkan sikap adaptif dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Proses pembelajaran yang dilakukan juga bersifat kolektif dan tidak hanya melibatkan pengelola. Dalam beberapa kasus, pengambilan keputusan atas evaluasi dilakukan melalui forum diskusi antar pemangku kepentingan, termasuk perwakilan komunitas, pelaku seni, serta pihak swasta yang menyewa ruang. Forum ini tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana perumusan solusi berbasis partisipasi. Sebagai contoh, usulan dari komunitas kreatif mengenai penambahan fasilitas ruang workshop dan dukungan logistik pada acara komunitas kini sedang dalam tahap kajian. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang terjadi tidak bersifat satu arah (*top-down*), melainkan membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, indikator *learning* dalam strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya mencerminkan adanya sistem evaluasi yang terbuka, partisipatif, dan adaptif. Meskipun masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan sudah mulai terlihat dalam berbagai aspek pengelolaan. Proses pembelajaran yang dijalankan tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga menjadi sarana penguatan inovasi dan peningkatan kualitas ruang publik secara keseluruhan. Hal ini menjadi bukti bahwa strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya bukanlah sebuah proyek statis, melainkan proses yang terus berkembang seiring waktu, kebutuhan, dan dinamika masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya dalam perspektif ruang publik, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata telah menjalankan peran strategisnya dengan cukup baik. Strategi yang diterapkan mencerminkan pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada penyediaan ruang publik yang inklusif, adaptif, serta selaras dengan konteks budaya dan sosial masyarakat kota. Strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya sebagai ruang publik menunjukkan penerapan kebijakan yang cukup terarah, menyeluruh, dan sesuai dengan prinsip strategi publik menurut Geoff Mulgan. Dalam indikator *Purposes* (tujuan), dapat disimpulkan bahwa pengembangan ini dilandasi oleh tujuan yang kuat dan relevan, yakni untuk menyediakan ruang publik yang inklusif, multifungsi, serta berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan nilai sejarah dan budaya lokal. Transformasi kawasan Balai Pemuda menjadi Alun-Alun Kota Surabaya merupakan bagian dari strategi pemerintah kota dalam merespon kebutuhan masyarakat terhadap ruang sosial yang representatif, sekaligus mengukuhkan identitas lokal melalui pelestarian cagar budaya. Tujuan ini juga didukung oleh visi besar pembangunan kota berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam regulasi formal.

Dari sisi *Environment* (lingkungan), pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya didukung oleh kondisi eksternal yang strategis, seperti letak geografis di pusat kota, keterhubungan dengan transportasi publik, dan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat. Faktor-faktor tersebut menciptakan peluang besar bagi alun-alun untuk berkembang

sebagai ruang publik yang terbuka dan inklusif. Meski begitu, hambatan seperti keterbatasan lahan parkir serta masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang publik, termasuk bangunan cagar budaya, menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius. Kelembagaan pengelola yang telah berjalan cukup baik, serta keterlibatan personel seperti petugas keamanan dan kebersihan, menunjukkan bahwa secara internal lingkungan operasional telah cukup mendukung keberlanjutan fungsi ruang publik ini. Selanjutnya, pada indikator *Direction* (pengarahan), Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki arah kebijakan yang jelas, tertuang dalam dokumen formal seperti Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2025 tentang RTRW. Pengarahan ini diterjemahkan dalam praktik oleh UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP), perencanaan kegiatan, serta koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, dalam implementasinya, pengarahan tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme evaluasi berkala serta peningkatan peran publik, khususnya dalam menjaga keberlanjutan dan nilai ruang publik yang telah dibangun.

Dalam aspek *Action* (tindakan), implementasi strategi pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya telah diwujudkan melalui berbagai program nyata, seperti penyelenggaraan pertunjukan seni, kegiatan edukatif, penyewaan ruang untuk UMKM dan komunitas, hingga pemeliharaan infrastruktur dan pengawasan lingkungan. Kegiatan rutin dan event berskala besar yang dilakukan menunjukkan bahwa ruang publik ini berfungsi aktif dalam mendukung interaksi sosial dan budaya. Meski demikian, tidak semua upaya berjalan optimal. Beberapa area, seperti foodcourt, menunjukkan tingkat utilisasi yang rendah, yang menandakan bahwa perlu ada evaluasi lebih lanjut dalam aspek desain, promosi, maupun keterlibatan tenant agar ruang tersebut lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Indikator terakhir, yaitu *Learning* (pembelajaran), menunjukkan bahwa pengelola Alun-Alun telah membuka ruang untuk refleksi dan evaluasi atas setiap kegiatan dan kebijakan yang dijalankan. Proses pembelajaran ini terlihat dari penggunaan berbagai mekanisme umpan balik, mulai dari kotak saran, media sosial, Google Review, hingga forum diskusi dengan stakeholder. Evaluasi dilakukan tidak hanya atas keberhasilan program, tetapi juga terhadap kendala yang muncul, seperti rendahnya minat terhadap acara tertentu, atau kurangnya pengawasan pada zona tertentu. Komitmen untuk mendengarkan dan menyesuaikan strategi pengelolaan dengan dinamika masyarakat merupakan kekuatan utama dalam menjamin keberlanjutan ruang publik ini ke depan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam mengembangkan Alun-Alun Kota Surabaya sebagai ruang publik yang lebih baik di masa mendatang. Pertama, perlunya peningkatan edukasi publik secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga dan merawat ruang publik, khususnya yang berada di kawasan cagar budaya. Edukasi dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, kegiatan komunitas, maupun program berbasis sekolah dan keluarga. Kedua,

optimalisasi ruang yang belum produktif seperti area foodcourt menjadi penting, melalui perbaikan tata kelola tenant, reposisi desain, serta strategi promosi yang lebih relevan dengan perilaku pengguna. Ketiga, desain dan manajemen ruang publik harus semakin inklusif, adaptif, dan fleksibel, agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat lintas usia dan latar belakang. Penataan area hijau, ruang duduk, dan fasilitas penunjang perlu dilakukan secara holistik dan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. Terakhir, kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah, komunitas, pelaku usaha, hingga akademisi perlu diperkuat guna menciptakan ruang publik yang tidak hanya dikelola secara teknis, tetapi juga dikembangkan secara inovatif dan partisipatif. Melalui strategi kolaboratif ini, Alun-Alun Kota Surabaya dapat terus berkembang sebagai ikon ruang publik yang hidup, relevan, dan berkelanjutan bagi masyarakat kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, D. S., & Oktariyanda, T. A. (2024). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Alun-Alun Melalui City Branding “Madinah Van Java” Di Kota Pasuruan (Studi Implementatif Kawasan Wisata Alun-Alun Kota Pasuruan). *Publika*, 322–336. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p322-336>
- Andersson, C. (2021). Public space and the new urban Agenda. *Public Space Reader*, 1, 420–425. <https://doi.org/10.4324/9781351202558-62>
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L., & Stone, A. (1992). *Public Space*.
- GoodStats. (2025). *Surabaya Jadi Kota dengan Persentase RTH Terbesar di Indonesia*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/surabaya-jadi-kota-dengan-persentase-rth-terbesar-di-indonesia-7HwHq>
- Jurgen Habermas. (2012). *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford University Press.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Lampau Target Pemerintah Pusat, Ruang Terbuka Hijau di Surabaya Capai 22 Persen*. Surabaya.Go.Id. <https://surabaya.go.id/id/berita/12113/lampau-target-pemerintah-pusat-ruang-terbuka-hijau-di-surabaya-capai-22-persen>
- Purwanto, B. H., & Afandi, M. N. (2021). *Manajemen Strategi Sektor Publik*. PT Refika Aditama.
- Subadyo, A. T., Tutuko, P., & Cahyani, S. D. (2018). *Assessment of Inclusive Historical Public Spaces in achieving preservation of such areas in Malang , Indonesia Case study: Public spaces developed during the Dutch Colonial period*. 6(4), 76–92.
- Suria, R. N. (2021). *Optimalisasi Peranan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Alun-alun Kota Surabaya*. 1(1).